

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah usaha untuk mengurangi pajak sah disebut praktik penghindaran pajak. Di negara Indonesia praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Praktik ini juga sudah umum dilakukan di berbagai negara berkembang. Pajak perusahaan adalah salah satu aspek penting karena Pajak Perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup sebuah perusahaan (Hendrati et al., 2023; Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan, 2016). Bagaimanapun, pungutan pajak oleh pemerintah merupakan salah satu arus pendapatan yang mungkin memengaruhi dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya kepentingan yang berbeda diantara pemerintah dan perusahaan akan mengakibatkan ketidakpatuhan pimpinan dan memengaruhi upaya penghindaran pajak perusahaan.

Dalam 5 tahun terakhir, Negara Indonesia memiliki sumber pendapatan terbesar yang datang dari penerimaan pajak sebesar 81,81% (Statistik Indonesia, 2023). Pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam memenuhi kebutuhan dan membantu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi dari pajak memiliki peran penting dalam membantu kebijakan pemerintah (Asyik et al., 2022; Prasetyo et al., 2022).

Kebanyakan perusahaan memiliki strategi untuk mengurangi biaya yang harus dibayar karena hal tersebut merupakan sebuah beban yang seharusnya dibayar oleh perusahaan atau sering disebut sebagai penghindaran pajak.

Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir liabilitas pajak perusahaan dengan mencoba mengambil keuntungan dari kelemahan hukum pajak di Indonesia. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya berdasarkan pada kebijakan pimpinan perusahaan tanpa unsur intensional. Perlu dipahami mengenai perbedaan antara pendapatan yang dikenakan pajak dan keuangan yang digunakan untuk menilai kepatuhan pajak di suatu perusahaan. Jika pendapatan pajak rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan perusahaan. penghindaran pajak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mendapatkan penghasilan yang besar (Kalbuana et al., 2022; Sudaryanto et al., 2022; Tjaraka et al., 2022)

Beberapa faktor dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Faktor ini termasuk narsisme CEO, ukuran dewan, direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan. Narsisme CEO ditandai oleh kepentingan pribadi yang besar, melebih-lebihkan diri sendiri, sombong, dan hasrat yang ingin dipuji. Hal tersebut dapat mendorong seorang CEO untuk melakukan pelanggaran hukum. Rasa terlalu percaya diri mereka dan persepsi ketidak profesionalan orang lain dapat mengarah keputusan yang kurang tepat (J.E. Prasetio et al., 2021; Nabilah Aliyyah, Indra Prasetyo, et al., 2021; Woro Utari et al., 2021).

Seorang CEO pada perusahaan memiliki berbagai macam tugas, yaitu menentukan visi dan misi serta strategi pada perusahaan. Dalam mengambil keputusan untuk menentukan dan mencapai perkembangan perusahaan, CEO mempunyai kedudukan dan pengaruh yang kuat (B. Endarto, Taufiqurrahman,

et al., 2021; M. Indrawati et al., 2021; Woro Utari et al., 2021). Seseorang dengan narsisme bisa dikatakan ancaman bagi perusahaan karena ia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, tidak mau untuk turun tangan, dan tidak mempercayai ahli perpajakan. Dengan demikian, mereka akan selalu membuat penyimpangan, yaitu penghindaran pajak, untuk meningkatkan citra perusahaan (Endarto, 2021; Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, W. Utari, et al., 2021). Teori *Upper Echelons* menyatakan bahwa kepribadian manajer menentukan pilihan dan hasil diskusi perusahaan, berupa kinerja, pengeluaran *R&D* dan pembayaran pajak (Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, Nawang Kalbuana, et al., 2021; Nabilah Aliyyah, Rusdiyanto Rusdiyanto, et al., 2021; Rusdiyanto Rusdiyanto, Indra Prasetyo, Diah Rani Nartasari, et al., 2021). Maka dari itu perilaku egois dapat memengaruhi tempat kerja dan mengganggu kinerja anggota tim.

Pada Konsep Good Corporate Governance terdapat konsep sistem dewan satu tingkat, dan sistem dewan dua tingkat. Perusahaan di Indonesia menggunakan sistem dewan dua tingkat yang memisahkan fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh dewan eksekutif dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan Pengawas (B. Endarto, S. Setyadji, et al., 2021; Endarto, 2021; Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, W. Utari, et al., 2021). Mengapa pengukuran corporate governance ini menggunakan dewan ukuran dewan direksi? Ukuran dewan direksi mempengaruhi bagaimana keputusan diambil dan seberapa cepat dewan dapat merespons situasi. Dewan yang lebih kecil cenderung lebih cepat dan efisien dalam pengambilan keputusan, sementara dewan yang lebih besar

dapat menawarkan berbagai perspektif namun mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Dewan Direksi atau Dewan Eksekutif terbagi menjadi 3, yaitu Presiden Direktur atau *Chief Executive Officer* (CEO), Direktur Keuangan atau *Chief Financial Officer* (CFO), dan Direktur Operasional atau *Chief Operating Officer* (COO). Tugas ketiganya berturut turut adalah memimpin dan bertanggung jawab atas stabilitas perusahaan (CEO), mengatur kegiatan keuangan dalam perusahaan (CFO), mengendalikan operasional perusahaan sehari-hari, dan memberika laporan kepada CEO dan juga manajer yang berada di bawah tanggung jawabnya (COO) (Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, Nawang Kalbuana, et al., 2021; Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, Rusdiyanto, et al., 2021; Rusdiyanto Rusdiyanto, Indra Prasetyo, Nabilah Aliyyah, et al., 2021).

Pengangkatan perempuan pada posisi direksi di perusahaan mulai dikampanyekan dalam satu dekade terakhir. Kampanye ini mendorong keberagaman gender dalam tata kelola perusahaan, khususnya pada level strategis perusahaan (I Gede Juanamasta et al., 2019; Rusdiyanto et al., 2020). Dalam mengkampanyekan hal tersebut, negara seperti Inggris dan Norwegia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan jumlah tertentu bagi keanggotaan perempuan pada posisi direksi perusahaan. Peningkatan proporsi perempuan pada level strategis berarti perbaikan tata kelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Susilowati et al., 2022; Yuhertiana et al., 2022). Dengan hal ini kehadiran wanita dalam dewan direksi memperkenalkan perspektif yang berbeda yang dapat meningkatkan kualitas keputusan. Hal ini

menunjukkan bahwa keragaman gender dalam dewan dapat berkontribusi pada pendekatan yang lebih sehat dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

Financial distress adalah terjadinya masalah kesulitan keuangan suatu perusahaan sebagai akibat dari kondisi keuangan dan perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga dapat meningkatkan bahaya kebangkrutan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak perusahaan untuk mempertahankan usahanya (Indrawati Yuhertiana et al., 2019; Safitri Selistiaweni et al., 2017; Yuhertiana et al., 2019). *Financial distress* terjadi karena kewajiban perusahaan melebihi kekayaan (aset), ukuran, dan keuntungan industri. Biasanya masalah kesulitan keuangan pada perusahaan terjadi karena perekonomian negara sampai perekonomian dunia sedang bermasalah. Ketika suatu bisnis berada dalam krisis keuangan, investor dan kreditor cenderung berhati-hati ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi dengan bisnis tersebut atau menanamkan modal pada perusahaan. Para investor sering kali memberikan reaksi yang buruk terhadap situasi yang sedang dialami perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan yang menimbulkan kesulitan keuangan dan menghindari kebangkrutan, dewan direksi dan komisaris perusahaan harus bertindak cepat (Murni, 2018; Priono et al., 2019; R. Rahma et al., 2016).

Peran investor pada perusahaan-perusahaan besar biasanya lebih beragam dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan besar akan lebih berdampak pada masyarakat umum dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan kecil

(Hendrati et al., 2023; Indrawati Yuhertiana, 2011; Maulidi et al., 2022). Karena masyarakat lebih memperhatikan perusahaan besar, maka perusahaan-perusahaan tersebut lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kondisi keuangannya. Akibatnya, perusahaan harus melaporkan statusnya dengan tingkat detail yang lebih tinggi (Al Ayub Ahmed et al., 2022; Nuswantara & Maulidi, 2021; Patriandari & Risti Fitriana, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (IRIANI et al., 2021; Nuswantara et al., 2018; Rina Milyati Yuniastuti & Jhon Nasyaroeka, 2022) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah jika ukuran perusahaan meningkat dan penghindaran pajak perusahaannya juga meningkat. Sedangkan (Jiang et al., 2021; N. L. P. P. Dewi, 2017) penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian (Nuswantara & Maulidi, 2017; Vivi Adeyani Tandean & Winnie, 2016) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kesenjangan penelitian dan hasil yang tidak konsisten ini mendorong penelitian lebih lanjut mengenai dampak ukuran perusahaan.

Penelitian ini menguji dan mengevaluasi pengaruh narsisme *CEO*, tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Motivasi dalam kajian penghindaran pajak perusahaan merupakan isu penting yang harus dipahami oleh seorang pengambil kebijakan di bidang akuntansi keuangan untuk memberikan

justifikasi atau motivasi sebagai berikut: penelitian ini didukung oleh teori keagenan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh narsisme *CEO*, tata kelola perusahaan, *financial distress*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan (Asyik et al., 2022; Wahidahwati & Asyik, 2022). Penelitian ini menunjukkan perusahaan signifikan dan terkenal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kategori LQ 45; Saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut cukup likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, serta sering melakukan transaksi untuk menarik investor.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan yaitu :

- 1.2.1 Apakah Narsisme *CEO* memiliki pengaruh pada Penghindaran Pajak Perusahaan?
- 1.2.2 Apakah Tata Kelola Perusahaan memiliki pengaruh pada Penghindaran Pajak Perusahaan?
- 1.2.3 Apakah Kesulitan Keuangan memiliki pengaruh pada Penghindaran Pajak Perusahaan?
- 1.2.4 Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh pada Penghindaran Pajak Perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan atas pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan bukti empiris terkait pengaruh :

1. Narsisme *CEO* pada Penghindaran Pajak Perusahaan
2. Tata Kelola Perusahaan pada Penghindaran Pajak Perusahaan
3. Kesulitan Keuangan pada Penghindaran Pajak Perusahaan
4. Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak Perusahaan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan untuk berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwasannya hasil penelitian dapat memperbanyak literatur mengenai Penghindaran Pajak Perusahaan dan menjadi kontribusi atas penelitian sebelumnya. Kemudian, diharapkan bahwasannya penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian bisa memberi kontribusi yang bermanfaat untuk perusahaan dalam melakukan pencegahan penghindaran pajak perusahaan

1.4 Sistematika Penelitian

Subbab ini memberikan gambaran singkat mengenai komponen-komponen yang akan dibahas dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari 5 bab atau bagian, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan deskripsi mengenai alasan yang mendasari penelitian dalam memilih topik yang diselidiki. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti juga menguraikan tujuan dan manfaat dari penelitian yang ingin dicapai. Terakhir, pada subbab terakhir, diungkapkan secara singkat mengenai struktur keseluruhan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup ringkasan dari studi-studi sebelumnya dan pemaparan tentang teori yang menjadi dasar dari penelitian. Selain itu, bagian ini juga membahas kerangka penelitian serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang prosedur atau tahapan pelaksanaan penelitian, dimulai dari variabel yang diteliti, populasi data, sampel, hingga teknik pengumpulan data, serta penjelasan mengenai metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini menguraikan tentang subjek penelitian, proses analisis data, serta hasil dari penelitian atau implementasi hasilnya. Selanjutnya, disajikan pula argumen yang mendukung temuan dari penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini adalah bagian penutup dari skripsi yang berisi rangkuman hasil penelitian, pembatasan, rekomendasi, dan saran untuk penelitian selanjutnya.